



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ARIF TOHA TJAHJAGAMA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 251036

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 786.060.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/90 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 275.670.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 60.390.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2643 m2/100 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 220.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 2.910.841.920

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 3.916.901.920

**III. HUTANG**

Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 3.916.901.920

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.